PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL SERTA DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA PEMBANGUNAN DAN TINGKAT KESENJANGAN DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Hesty Sapriana
Hesty13@gmail.com
Theresia Militina
Aji Sofyan Effendi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA 2018

ABSTRACT

The main purpose of this study is to examine and analyze the effects of the Local Pure Revenue, Revenue Sharing Funds and Special Allocation Funds directly or indirectly to the Development Expenditure in East Kalimantan Province, and its overall impact on regional gaps in the province of East Kalimantan. This research was conducted by using research method of documentation (archeival) with quantitative research approach, using secondary data during 2007 - 2016 period. The result of this research shows that in the first model, Local Pure Revenue, Revenue Sharing Funds and Special Allocation Funds do not directly influence significant to the Development Expenditure in East Kalimantan Province. The second model of Local Pure Revenue, Revenue Sharing Funds and Special Allocation Funds directly affected significantly the Regional Gaps Level in East Kalimantan province. Development expenditure directly affects significantly the Regional Gaps in East Kalimantan Province. The Indirect Revenue Effect of Local Pure Revenue on Regional Gaps through Development Expenditure, obtained positive coefficient of 0.042354, then Revenue Sharing Funds has direct positive effect of 0,005694 to Regional Gaps Level, but Special Allocation Funds has indirectly negative influence equal to - 0,002925 towards Regional Gaps Level, so that can not be supported hypothesis.

Keywords: *Local Pure Income (PAD), Profit Sharing Funds (DBH), Special Allocation Funds (DAK), Development Spending, Regional Imbalance*

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus secara langsung maupun tidak langsung terhadap Belanja Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, dan pengaruhnya secara keseluruhan terhadap kesenjangan daerah di provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian dokumentasi (archeival) dengan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder pada kurun waktu 2007 – 2016. Hasil penelitian menunjukkan pada model pertama, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus secara langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Model kedua Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus secara langsung berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah di provinsi Kalimantan Timur. Belanja Pembangunan secara langsung berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah melalui Belanja Pembangunan, diperoleh koefisien positif sebesar 0,042354, kemudian Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh langsung secara positif sebesar 0,005694 terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah, namun Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh tidak langsung secara negative sebesar - 0,002925 terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah, sehingga tidak dapat didukung hipotesisnya.

Kata kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus, Belanja Pembangunan, Tingkat Kesenjangan Daerah*

I. Pendahuluan

Pada umumnya setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada. Peningkatan kesejahtaraan ini antara lain dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya (Sukirno, 1985).

Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah.Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yangterdapat pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*) (Sjafrizal, 2012).

Komposisi anggaran idealnya harusnya berbalik, di mana belanja langsung bisa lebih besar. Komposisi anggaran yang tidak ideal dapat membuat pemerintah daerah sulit untuk melaksanakan pembangunan karena kurangnya dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, padahal dalam anggaran belanja daerah, pemerintah daerah juga mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Berlakunya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat.

Tabel 1.
APBD Provinsi Kalimantan Timur (2007-2016) dalam juta Rupiah

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus	Belanja Pembangunan
1	2016	2,965,980	3,805,374	218,651	5,232,228
2	2015	3,894,922	4,194,971	1,038	10,141,808
3	2014	6,582,337	17,419,161	253,975	11,206,226
4	2013	6,853,797	16,865,016	345,560	41,063,014
5	2012	5,736,379	14,332,335	235,155	37,206,425
6	2011	4,543,774	5,077,620	38,190	34,789,432
7	2010	2,618,030	4,274,660	33,640	5,786,220
8	2009	2,012,560	3,100,090	3,810	5,533,120
9	2008	1,592,566	2,893,112	3,522	5,435,667
10	2007	1,237,466	2,511,250	3,158	5,233,133

Sumber: BI, Pemprov Kaltim & BPS Kaltim 2017

Pada tabel 1. dapat terlihat bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, serta dana alokasi khusus terhadap belanja pembangunan selama sepuluh tahun terakhir terjadi penurunan dan peningkatan APBD Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan pada tahun 2013 pendapatan asli daerah sebesar 6,853,979 juta, dana bagi hasil sebesar 16,865,016 juta, serta dana alokasi khusus sebesar 345,560 juta berpengaruh pada belanja pembangunan sebesar 41,063,014 juta di provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil, Serta Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Pembangunan dan Tingkat Kesenjangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur".

II. Kerangka Penelitian dan Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan

Pendapatan Asli Daerah dibentuk dari sebagian besar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam kaitannya sejauh mana besaran pajak daerah, akan berdampak kepada publik spending, artinya semakin besar pajak dari masyarakat akan berdampak terhadap peningkatan belanja publik, seperti penelitian Oates (1969) yang menyajikan beberapa temuan empiris mengenai efek dari anggaran publik pemerintah daerah di USA terhadap pengeluaran pembangunan sektor property di masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada asumsi mengenai sejauh mana pajak atas berbagai komponen properti dikapitalisasi.

Beberapa landasan teoritis yang menjelaskan mengapa penelurana atau investasi pemerintah dalam hal ini adalah investasi pemerintah dalam bentuk balanja pembangunan akan bereaksi dari adanya perolehan pajak pajak lokal kembali ke teori investasi neoklasik, yang dipelopori oleh Jorgenson (1963). Devereux dkk. (2008) dan Alt-shuler dan Goodspeed (2002), misalnya, meneliti interaksi yang signifikan antara pajak yang dipungut pemerintah dengan pengeluaran negara.

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan, salah satunya adalah melakukan pengeluaran belanja pembangunan.

Belanja pembangunan adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang non konsumtif, berbentuk investasi (proyek-proyek), berbentuk proyek fisik maupun non fisik dan diajukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah sebagai salah satu pelaku pembangunan, yang dananya juga tergantung pada pendapatan pemerintah daei sektor pajak.

Belanja pembangunan tersebut meliputi belanja pembangunan dalam bentuk rupiah dan belanja pembangunan dalam bentuk bantuan proyek yang dibiayai dari pinjaman atau hibah luar negeri. Belanja pembangunan dalam bentuk rupiah bersumber dari tabungan pemerintah dan bantuan program yang digunakan untuk membiayai pembelanjaan sektoral melalui departemen atau lembaga non departemen dan dialokasikan pula untuk membiayai proyek-proyek. Semakin besar pendapatan suatu daerah maka tabungan daerah yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas belanja pembangunan akan semakin besar pula dan disesuaikan dengan komitmen dan kebijakan dari pemerintah itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kesenjangan Daerah

Menurut Todaro (2003), pemerataan yang lebih adil di daerah yang berkembang merupakan suatu kondisi atau syarat yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin tinggi kesenjangan daerah akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri. Jika dikaitkan dengan pendapatan daerah, hal ini dapat dijelaskan bahwa kesenjangan daerah tergantung dari pendapatan sektor pajak daerah.

Mekanisme yang sering diajukan untuk hubungan antara ketidaksetaraan sosial adalah ketidaksetaraan pendapatan semakin memperkuat dampak perpajakan dan pengeluaran publik. Beberapa model ekonomi politik menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang heterogen, penduduk tidak dapat menyetujui komposisi barang publik atau pajak dan biaya yang digunakan untuk mendanai pembangunan (Benabou, 1996, 2000). Secara khusus, rumah tangga kaya dapat

menyediakan sendiri kebutuhannya, dan masyarakat miskin dapat memprioritaskan konsumsi pribadi atas barang publik, hal ini menghasilkan perbedaan pendapat antara tujuan dan pertengahan distribusi pendapatan (Epple & Romano, 1996). Sehingga masyarakat kaya dengan pengeluaran pajaknya dapat berkontribusi terhadap belanja pembangunan.

Menurut Armstrong and Taylor (2000) kesenjangan ekonomi antar daerah yang bertahan dalam waktu yang lama dapat mempengaruhi efisiensi ekonomi suatu daerah dan akan memiliki konsekuensi sosial politik. Tingkat kesenjangan antar daerah umumnya terjadi karena perbedaan pertumbuhan pendapatan per kapita. Ada banyak faktor di balik perbedaan pertumbuhan ini. Barro (1990) menemukan bahwa nilai awal dari *human capital* berpengaruh terhadap pertumbuhan. Dalam *Endogenous Growth models*, per tumbuhan per kapita dan investasi cenderung berjalan searah, sebaliknya pertumbuhan PDRB per kapita and *net fertility* cenderung bergerak berlawanan.

Ketimpangan pendapatan antar daerah, tergantung dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerima pendapatan dalam daerah tersebut, baik itu golongan masyarakat maupun wilayah tertentu dalam daerah tersebut. Perbedaan jumlah pendapatan yang diterima itu menimbulkan suatu distribusi pendapatan yang berbeda, sedangkan besar kecilnya perbadaan tersebut akan menentukan tingkat pemerataan pendapatan (ketimpangan pendapatan) daerah tersebut. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan ini akan tergantung dari besar kecilnya perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh penerima pendapatan. Sehingga timpang atau tidaknya pendapatan daerah dapat diukur melalui distribusi penerimaan pendapatan antar golongan masyarakat ataupun antar wilayah Koefisien Gini Produk nasional bruto per kapita tertentu, dimana pendapatan yang diterima wilayah tersebut terlihat pada nilai pendapatan daerahnya, sedangkan untuk golongan masyarakat tentunya adalah jumlah yang diterimanya pula.

Dana Bagi Hasil dan Belanja Pembangunan

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang diperoleh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meningkatan alokasi Belanja Daerah guna meningkatkan pelayanan publik bagi daerah sebagai tujuan dari desentralisasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Masdjojo dan Sukartono (2009) yang menyatakan Dana Bagi Hasil berpengaruh pada Belanja Daerah.

Menurut Halim dan Mujib (2009), untuk mengurangi ketimpangan vertical (*vertical imbalance*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah dilakukan system bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pendistribusian dana bagi hasil dari pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diatur berdasarkan Permendagri.

Maimunah (2006) menyatakan bahwa kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan berlakunya desentralisasi maka pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah.

Dana Bagi Hasil dan tingkat Kesenjangan Daerah

Dengan adanya ketidakmerataan dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus dari pemerintah ke daerah dikarenakan banyak aspek juga menyebabkan distribusi pendapatan juga menjadi tidak merata, sehingga menimbulkan tingkat kesenjangan diantara banyak daerah.

Dalam upaya mengurangi ketimpangan vertical (*vertical imbalance*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah maka diberlakukan bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pendistribusian dana bagi hasil dari pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diatur berdasarkan Permendagri (Menurut Halim & Mujib (2009),).

Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola

ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar.

Dana Alokasi Khusus dan Belanja Pembangunan

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan daerah yang bersifat khusus. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksuddengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daereah lain, contohnya kebutuhan di daerah transmigrasi, pembangunan jalan di daerah terpencil, saluran irigasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Askam Tuasikal (2008) dan Kristina Handayani (2009) yang menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh pada belanja pembangunan suatu daerah.

Darise (2008:137-138) DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatankegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Penelitian serupa dilakukan oleh Bambang Prakosa (2004) di wilayah DIY dan Jateng memperoleh hasil PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Soeratno (2005-2009) memperoleh hasil yaitu bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berimplikasi secara signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti semakin besar pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sebagai sumber penerimaan daerah maka semakin besar dana yang dikeluarkan untuk belanja daerah pada kabupaten/kota di Jawa Barat. Kusnandar, Dodik Siswantoro dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011 (LHP-BPK 2011) secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya alokasi belanja modal dipengaruhi oleh DAU, PAD, SiLPA dan luas wilayah. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh. Diah Sulistyowati yang meneliti Kabupaten/Kota di Bali (2011) memperoleh hasil yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal.

Holtz–eaken et.al (1985), menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja pemerintah daerah. Studi yang dilakukan Legrenzi dan Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangk a panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Prakoso (2004) dalam Adi dan Harianto (2007), memperoleh temuan empiris yang sama bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Dana Alokasi Khusus dan Tingkat Kesenjangan Daerah

Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah otonom melalui mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012:88). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena

sesuai dengan prinsip desentralisasi–tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil dan saluran irigasi primer.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tidak semua daerah di Indonesi memperolah dana alokasi khusus. Dana ini diprioritaskan untuk daerah-daerah tertentu yang memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus aialokasikan dengan tujuan untuk mempercepat perkembangan daerah tertentu serta mencapai tujuan kegiatan atau program tertentu sesuai skala nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Nahlia (2014) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan pemberian DAK diprioritaskan untuk mencapai tujuan dari program/kegiatan tertentu bagi daerah yang menerima dana alokasi khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (UU No. 33 Tahun 2004). Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus.

Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Belanja Pembangunan dan Tingkat Kesenjangan Antar Daerah

Ada jenis belanja pemerintah yang bersifat *procyclical*[1] ketika pengeluaran meningkat pada tingkat yang lebih cepat daripada pendapatan dalam kenaikan ekonomi namun jatuh pada tingkat yang lebih cepat dalam sebuah resesi. Para ekonom mengantisipasi pengeluaran *countercyclical*[2] (Alesinaet al., 2008), namun ada bukti *procyclicality* (Gavin et al., 1996; Talviand Végh, 2005; Woo, 2009). Karena sebagian besar penelitian berfokus pada pengeluaran pemerintah pusat (Sørensen *et al*., 2001), tujuan pertama dalam penelitian ini adalah untuk menguji prediksi bahwa belanja pemerintah daerah bersifat *procyclical* terhadap kesenjangan antar daerah.

Dua model ketimpangan yaitu teori Harrod-Domar dan Neo-Klasik memberikan perhatian khusus pada peranan kapital yang dapat direpresentasikan dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah untuk menarik kapital kedalam daerahnya, hal ini jelas akan berpengaruh pada kemampuan daerah untuk tumbuh sekaligus menciptakan perbedaan dalam kemampuan menghasilkan pendapatan. Investasi akan lebih menguntungkan bila dialokasikan pada daerah-daerah yang dinilai mampu menghasilkan pengembalian (*return)* yang besar dalam jangka waktu yang relatif cepat. Mekanisme pasar justru akan menyebabkan ketidakmerataan, dimana daerah-daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin cepat sementara daerah yang kurang maju tingkat pertumbuhannya justru relatif lambat. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang diseluruh daerah.

---

[1] Sebuah indikator ekonomi procyclical yang sifatnya bergerak sama dengan pergerakan ekonomi. Sehingga jika perekonomian berjalan baik, ditunjukan angka-angka indikator yang juga membaik/meningkat, serta sebaliknya jika perekonomian melemah atau menuju resesi, maka angka-angka indikator perekonomian tersebut juga memburuk/menurun.

[2] Sebuah indikator ekonomi countercyclical bersifat bergerak berlawanan arah dengan pergerakan perekonomian. Angka Pengangguran semakin berkurang jika pertumbuhan ekonomi semakin baik, adalah salah satu contoh indikator ekonomi cauntercyclical.

Kerangka Konsep

Kerangka konsep ini dibentuk atas dasar kajian teori yang telah dikemukakan. Dalam kerangka konsep penelitian ini melukiskan adanya hubungan antara variable eksogen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), dan Dana Bagi Hasil (X_2), serta Dana Alokasi Khusus (X_3) dan Variabel Endogen yaitu Belanja Pembanguanan (Y_1) dan Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2).

Hubungan Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Belanja Pembangunan (Y_1) serta Dana Bagi Hasil (X_2) dan Belanja Pembangunan (Y_1) kemudian Dana Alokasi Khusus (X_3) dan Belanja Pembangunan (Y_1). Kemudian hubungan Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) serta Dana Bagi Hasil (X_2) dan Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2), kemudian Dana Alokasi Khusus (X_3) dan Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) menggambarkan hubungan korelasi sedangkan Belanja Pembanguanan (Y_1) dan Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) menggambarkan hubungan pengaruh (Casual). Hubungan Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) melalui Belanja Pembanguanan (Y_1) dan Dana Bagi Hasil (X_2) terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) melalui Belanja Pembanguanan (Y_1) serta Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) melalui Belanja Pembanguanan (Y_1) menggambarkan hubungan sebab akibat.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), serta Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Belanja Pembangunan (Y_1), dan dari Belanja Pembangunan (Y_1) dan Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) disebut pengaruh langsung (direct effect). Sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), serta Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) melalui Belanja Pembangunan (Y_1), Belanja Pembangunan (Y_1) di sebut pengaruh tidak langsung (indirect effect).

Kerangka konsep dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

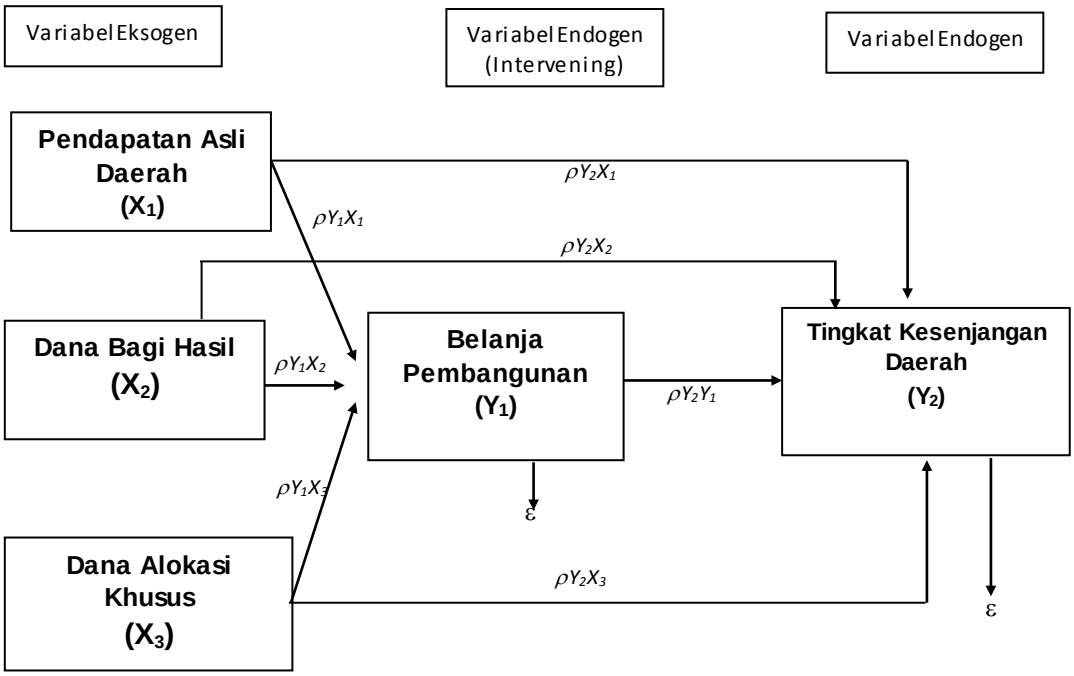

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, dasar teori dan kerangka konsep serta penelitian terdahulu maka diajukan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah secara langsung berpengaruh signifikan terhadap belanja pembangunan di provinsi Kalimantan Timur.
2. Dana bagi hasil secara langsung berpengaruh signifikan terhadap belanja pembangunan di provinsi Kalimantan Timur.

3. Dana alokasi khusus secara langsung berpengaruh signifikan terhadap belanja pembangunan di provinsi Kalimantan Timur.
4. Pendapatan asli daerah secara langsung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesenjangan daerah di provinsi Kalimantan Timur.
5. Dana bagi hasil daerah secara langsung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesenjangan daerah di provinsi Kalimantan Timur.
6. Dana alokasi khusus secara langsung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesenjangan daerah di provinsi Kalimantan Timur.
7. Belanja Pembangunan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesenjangan daerah di provinsi Kalimantan Timur.
8. Pendapatan asli daerah secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap tingkat kesenjangan daerah melalui belanja pembangunan di provinsi Kalimantan Timur.
9. Dana bagi hasil secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap tingkat kesenjangan melalui belanja pembangunan provinsi Kalimantan Timur.

Dana alokasi khusus secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap tingkat kesenjangan melalui belanja pembangunan di provinsi Kalimantan Timur.

III. Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian dokumentasi (*archeival*) dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik, yang dapat dibedakan menjadi data interval dan data rasio (Kuncoro, 2001:23). Jenis penelitian dokumentasi (*archeival*) ini menggunakan data sekunder dan memfokuskan pada pengungkapan hubungan antar variabel, yaitu dimana penelitian diarahkan untuk melihat apakah terdapat hubungan antar variabel yang telah ditentukan.

Guna mempermudah penulisan dan penganalisaan dalam penelitian ini, maka selanjutnya diberikan beberapa pengertian atau batasan secara operasional dari masing-masing variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Belanja Pembangunan (Y_1) adalah total belanja daerah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (pada tahun 2006 berubah istilah menjadi belanja langsung) tahun 2007-2016 (dalam satuan Rupiah).
2) Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) adalah perbedaan distribusi pendapatan daerah, menunjukkan merata atau tidaknya pembagian hasil pembangunan suatu daerah di kalangan penduduknya, yang diukur dengan menggunakan indeks *Williamson,* dalam kurun waktu 2007-2016.
3) Pendapatan asli daerah (X_1) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu 2007-2016 (dalam satuan Rupiah).
4) Dana Bagi Hasil (X_2) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu 2007-2016 (dalam satuan Rupiah).
5) Dana Alokasi Khusus (X_3) adalah besaran DAK yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu 2007-2016 (dalam satuan Rupiah).

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan pengolahan dan analisis data kuantitatif dengan mengunakan paket program IBM *SPSS Statistics 20*.

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini digunakan metode *path analysis* (analisis jalur). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Model persamaan *path analysis* yang digunakan adalah :

1. Pengaruh Langsung Variabel X_1, X_2, X_3 Terhadap Y_1
   $Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \epsilon$
   $Y_1 = \alpha + \beta_2 X_2 + \epsilon$
   $Y_1 = \alpha + \beta_3 X_3 + \epsilon$
2. Pengaruh Langsung Variabel X_1, X_2, X_3 Terhadap Y_2
   $Y_2 = \alpha + \beta_4 X_1 + \epsilon$
   $Y_2 = \alpha + \beta_5 X_2 + \epsilon$
   $Y_2 = \alpha + \beta_6 X_3 + \epsilon$
3. Pengaruh Langsung Variabel Y_1 Terhadap Y_2
   $Y_2 = \alpha + \beta_7 Y_1 + \epsilon$
4. Pengaruh Tidak Langsung Variabel X_1, X_2, X_3 Terhadap Y_2 melalui Y_1
   $Y_2 = \alpha + \beta_8 Y_1 + \epsilon$ (X_1 terhadap Y_2 melalui Y_1)
   $Y_2 = \alpha + \beta_9 Y_1 + \epsilon$ (X_2 terhadap Y_2 melalui Y_1)
   $Y_2 = \alpha + \beta_{10} Y_1 + \epsilon$ (X_3 terhadap Y_2 melalui Y_1)

   Dimana :
   Y_1 = Variabel dependen (Belanja Pembangunan)
   Y_2 = Variabel dependen (Tingkat Kesenjangan Daerah)
   X_1 = Variabel Pendapatan Asli Daerah
   X_2 = Variabel Dana Bagi Hasil
   X_3 = Variabel Dana Alokasi Khusus
   α = Konstanta
   β_1 = Koefisien analisis jalur
   β_2 = Koefisien analisis jalur
   β_3 = Koefisien analisis jalur
   β_4 = Koefisien analisis jalur
   β_5 = Koefisien analisis jalur
   β_6 = Koefisien analisis jalur
   β_7 = Koefisien analisis jalur
   β_8 = Koefisien analisis jalur
   β_9 = Koefisien analisis jalur
   β_{10} = Koefisien analisis jalur

IV. Hasil dan Pembahasan

Sebagai mana hipotesis dan model penelitian, maka penelitian ini menggunakan dua model. Analisis model 1 yaitu pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), dan Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap variabel Belanja Pembangunan (Y_1). Besarnya nilai koefisien jalur masing-masing variabel dengan menggunakan software SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Estimasi Model 1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-706,665	2275,910		-,310	,767		
	X1	1,086	,807	,738	1,346	,227	,179	5,588
	X2	,146	,640	,125	,228	,827	,180	5,563
	X3	-,075	,088	-,203	-,846	,430	,932	1,073

a. Dependent Variable: Y1
Sumber: Ouput SPSS

Dari hasil regresi jalur pada model 1 di atas diketahui bahwa nilai variabel Dana Alokasi Khusus (X_3) menunjukkan hubungan negatif terhadap Belanja Pembangunan (Y_1). Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien -0,075 sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Bagi Hasil (X_2) menunjukkan hubungan positif dengan nilai masing-masing 1,086 dan 0,146.

Analisis model 2 yaitu pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), dan Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap variabel Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) yang diwakili dengan nilai Indeks Williamson. Besarnya nilai koefisien jalur masing-masing variabel dengan menggunakan software SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.
Hasil Estimasi Model 2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	369,397	177,860		2,077	,092		
	X1	-,195	,071	-2,011	-2,729	,041	,137	7,275
	X2	,098	,050	1,267	1,958	,108	,178	5,611
	X3	,011	,007	,448	1,495	,195	,832	1,201
	Y1	,039	,032	,590	1,228	,274	,322	3,101

a. Dependent Variable: Y2
Sumber: Ouput SPSS

Dari hasil regresi jalur pada model 2 di atas diketahui bahwa nilai variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) menjukkan hubungan negatif terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2). Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien -0,195, dan untuk Dana Bagi Hasil (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) serta Belanja Pembangunan (Y_1) menunjukkan hubungan positif dengan nilai masing-masing 0,098 dan 0,11. Kemudian Belanja Pembangunan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kesenjangan Daerah dengan nilai koefisien 0,39.

Berdasarkan hasil analisis, pada tahap awal yang menjadi variabel terikatnya adalah Belanja Pembangunan (Y_1) sedangkan variabel bebasnya adalah Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), dan Dana Alokasi Khusus (X_3).

Dimana hasil pengujian persamaan Pertama, yaitu sebagai berikut:
Pada persamaan pertama

$$Y_1 = -706,665 + 1,086X_1 + 0,146X_2 - 0,075X_3$$

Dari persamaan model 1, diperoleh nilai konstanta sebesar -706,665 memiliki arti bahwa jika nilai Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), serta Dana Alokasi Khusus (X_3) tetap maka Belanja Pembanguan (Y_1) akan menurun sebesar 706,665%. Selanjutnya, nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 1,086 memiliki arti bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) naik sebesar 1%, maka Belanja Pembangunan (Y_1) akan naik sebesar 1,086% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Selanjutnya nilai koefisien Dana Bagi Hasil (X_2) sebesar 0,146 memiliki arti bahwa Dana Bagi Hasil (X_2) naik sebesar 1% maka Belanja Pembangunan (Y_1) akan naik sebesar 0,146% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Kemudian nilai koefisien Dana Alokasi Khusus (X_3) sebesar -0,075 memiliki arti bahwa jika nilai Dana Alokasi Khusus (X_3) naik sebesar 1% maka Belanja Pembangunan (Y_1) akan menurun sebesar 0,146% dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Pada tahap kedua yang menjadi variabel terikatnya adalah Belanja Pembangunan (Y_1) dan Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) sedangkan variabel bebasnya adalah Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), dan Dana Alokasi Khusus (X_3).

Selanjutnya hasil pengujian persamaan kedua, yaitu sebagai berikut:
Pada persamaan kedua

$$Y_2 = 369{,}397 - 0{,}195X_1 + 0{,}098X_2 + 0{,}011X_3 + 0{,}039Y_1$$

Dari persamaan model 2, diperoleh nilai konstanta sebesar 369,397 memiliki arti bahwa jika nilai Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3) dan Belanja Pembangunan (Y_1) tetap maka nilai Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) akan naik sebesar 369,397%. Selanjutnya, nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar -0195 memiliki arti bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah (X_1) naik sebesar 1% maka Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) akan turun sebesar 0,195% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Selanjutnya nilai koefisien Dana Bagi Hasil (X_2) sebesar 0,098 memiliki arti bahwa Dana Bagi Hasil (X_2) naik sebesar 1% maka Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) akan naik sebesar 0,098% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Kemudian nilai koefisien Dana Alokasi Khusus (X_3) sebesar 0,011 memiliki arti bahwa jika nilai Dana Alokasi Khusus (X_3) naik sebesar 1% maka Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) akan naik sebesar 0,011% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Terakhir, nilai koefisien Belanja Pembangunan (Y_1) sebesar 0,039 yang berarti jika Belanja Pembangunan (Y_1) naik 1% Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) akan naik sebesar 0,039% dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Pengaruh Langsung Pendapatan asli daerah terhadap belanja pembangunan.

Pendapatan asli daerah (X_1) memiliki hubungan positif terhadap belanja pembangunan (Y_1), namun tidak signifikan, sehingga hipotesis ditolak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Von Furstenberg et al., (1986), Prakoso (2004), Kusumadewi dan Rahman (2007), Masdjojo dan Sukartono (2009), Nugraeni (2011) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Namun penelitian lain seperti Jiwatami (2013) memiliki pandangan yang berbeda, ia menyatakan secara nasional Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negative terhadap Belanja Daerah. Kemudian hasil dari penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan Suandi (2014) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk Belanja Pembangunan.

Mengapa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Pembangunan, bisa disebabkan oleh beerapa masalah, antara lain di Kalimantan Timur, Pendapatan Asli Daerah lebih banyak disumbangkan oleh Pajak Kendaraan Bermotor, yang sejatinya di perutukan untuk menyediakan infrastruktur jalan, namun demikian untuk beberapa tahun terakhir Belanja Pembangunan tidak mengarah pada pembangunan infrastruktur jalan, namun ke arah pembangunan sektor pertanian, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan jalan Tol Samarinda - Balikpapan, lebih banyak diserah dari APBN dan sektor swasta.

Pengaruh langsung Dana Bagi Hasil terhadap belanja pembangunan.

Hasil di atas menujukkan bahwa dana bagi hasil (X_2) memiliki hubungan positif dan namun tidak signifikan terhadap belanja pembangunan (Y_1), sehingga hipotesis ditolak. Hal ini memberikan gambaran bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan dana yang bersumber dari APBN dapat menjadi salah satu nafas untuk membangun, khususnya di Kalimantan Timur. Dana Bagi Hasil yang diperoleh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meningkatan alokasi Belanja Daerah guna meningkatkan pelayanan publik bagi Daerah sebagai tujuan dari desentralisasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Masdjojo dan Sukartono (2009) yang menyatakan Dana Bagi Hasil berpengaruh pada Belanja Daerah. Halim dan Mujib (2009) menyatakan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil, yang peruntukannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk barang publik (jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan dll). Pada dasarnya, selain dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pendapatan daerah, Dana Bagi Hasil juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, walaupun pendapatan atas pajak negara dan pendapatan yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) merupakan wewenang pemerintah pusat untuk memungutnya, namun sebagai daerah penghasil, Pemerintah Daerah juga berhak untuk mendapatkan bagian atas pendapatan dari potensi daerahnya tersebut dalam rangka membangun daerahnya.

Tidak signifikannya pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Pembangunan, disebabkan oleh menurunnnya PABD Kalimatan Timur dalam 3 Tahun terakhir, sehingga fokus pada pembangunan menjadi menurun, namun lebih mengarah pada Belanja Rutin, disamping menurunnya lifting migas dan penurunan sektor pajak, yang mengakibatkan rendahnya bagi hasil untuk provinsi Kalimantan Timur.

Pengaruh langsung Dana Alokasi Khusus terhadap belanja pembangunan.

Dana Alokasi Khusus (X_3) memiliki hubungan negatif terhadap Belanja Pembangunan (Y_1) dan tidak signifikan, sehingga hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian dari Masdjojo dan Sukartono (2009), Darmayasa dan Suandi (2014) yang menyatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, sebaliknya hasil penelitian dari Nugraeni (2011) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah. Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat jika dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Maka dari itu dalam kontek penelitian ini Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari transfer pemerintah pusat dalam rangka mendukung fungsi utama tersebut meliputi fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah inilah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan Pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional secara adil, termasuk pembagian kewenangan dalam pengelolaan Keuangan Negara dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tidak signifikannya dampak Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Pembangunan, disebabkan untuk beberapa Tahun terakhir Belanja Pemerintah mengalami penurunan, ditambah postur APBD untuk Dana Alokasi Khusus semakin tidak jelas dan tidak mengarap pada sektor tertentu. Peruntukan Dana Alokasi Khusus lebih pada reboisasi lain, namun realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah Kalimantan Timur.

Pengaruh langsung Pendapatan asli daerah terhadap tingkat kesenjangan daerah

Pendapatan Asli Daerah (X_1) memiliki pengaruh negatif teradap Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2), dan signifikan, sehingga hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin rendah kesenjangan antar Wilayah di Kalimantan Timur. Hasil ini didukung oleh penelitian Sasana (2009) yang menyatakan bahwa jika kemampuan daerah tinggi, maka akan mudah untuk mempersempit kesenjangan daerah sekaligus mensejahterakan masyarakatnya, maka untuk menutupi hal itu, perlu diperkuat desentralisasi fiskal.

Namun demikian, walau Pendapatan Asli Daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap Kesenjangan Daerah, namun perolehan Pendapatan Asli Daerah masih cukup rendah di Kalimantan Timur khususnya di beberapa Kabupaten, hal ini bisa disebabkan oleh masih lemahnya kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Isyarat bahwa Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu Pendaptan Asli Daerah juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Sebagaimana Santoso (1995:20) mengemukakan bahwa Pendaptan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun Pendapatan Asli Daerah tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Penerimaan Daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu Pemerintah Daerah.

Namun upaya Pendapatan Asli Daerah untuk dapat menjaga jurang yang dalam masih jauh, karena minimnya potensi di daerah, sementara kebutuhan Pembangunan semakin hari semakin meningkat. Pendapatan Asli Daerah meskipun diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, pada saat ini kondisinya masih kurang memadai. Dalam arti bahwa proporsi yang dapat disumbangkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif rendah.

Menurut Jaya (1996:5) beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya Pendaptan Asli Daerah disebabkan lebih banyak pada unsur perpajakan. Lebih jauh mengenai perpajakan dan permasalahannya perlu dikemukakan Pendapat Reksohadiprodjo (1996: 74-78), yaitu bahwa beberapa masalah yang sering dihadapi sistem pajak di daerah secara keseluruhan, di antaranya adalah adanya kemampuan menghimpun dana yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, yang disebabkan karena perbedaan dalam *resources endowment*, Tingkat Pembangunan, dan Derajat Urbanisasi. Masalah lainnya adalah terlalu banyaknya jenis pajak daerah dan sering tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Tidak ada perbedaan yang jelas antara pajak dengan pungutan lainnya, dan masalah Biaya Administrasi Pajak yang tinggi.

Pengaruh langsung Dana Bagi Hasil terhadap tingkat kesenjangan daerah

Pada model 2 variabel Dana Bagi Hasil (X_2) memiliki hubungan positif terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2), sehingga hipotesis ditolak. Hasil temuan ini agak berbeda dengan logika teoritis, namun dapat dijelaskan, walaupun Dana Bagi Hasil meningkat namun dampaknya hanya kawasan perkotaan di Kalimatan Timur, sementara Kesenjangan Daerah masih terasa di pelosok, karena Kalimatan Timur memiliki wilayah yang luas. Hasil Penelitian ini bertentangan dengan temuan Gavin et al., (1996), Talviand Végh, (2005) dan Woo (2009) bahwa transfer Pemerintah dapat mempersempit jurang Kesenjangan pendapatan di daerah. Salah satu peran yang dilakukan Pemerintah adalah membagihasilkan hasil sumberdaya dan pungutan pajak kepada daerah berdasarkan porsi yang seimbang.

Besarnya proporsi Dana Bagi Hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tergantung dari jenis Pendapatan. Begitu pula antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota proporsinya tidak merata untuk setiap jenis Pendapatan. Adakalanya Pemerintah Pusat mendapatkan proporsi Bagi Hasil yang lebih besar dibandingkan dengan Pemerintah Daerah, seperti: Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh), namun Pemerintah Pusat juga bias saja menerima proporsi yang lebih kecil dibandingkan proporsi bagi hasil kepada Pemerintah Daerah, seperti: Pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pembagian proporsi ini tergantung dari keterlibatan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan dan dampaknya terhadap masyarakat daerah.

Tidak signifikannya Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah bisa disebabkan, sebagaimana dikatakan di atas bahwa Bagi Hasil tergantung dari lifting migas dan perolehan PPh dan PPN Kalimantan Timur, sementara kedua item penerimaan ini mangalami penurunan sangat signifikan, sehingga dampaknya dalam mengurangi Kesenjangan antar daerah menjadi menurun.

Pengaruh langsung Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kesenjangan daerah

Hasil pada model 2, menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (X_3) memiliki hubungan positif terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2), sehingga hipotesis di tolak, artinya semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka akan menurunkan tingkat kesenjangan antar daerah di provinsi Kalimantan Timur.

Penggunaan Dana Alokasi Khusus dalam alokasi belanja modal secara optimal akan mampu menurunkan Kesenjangan Daerah melalui peningkatan kualitas Pembangunan manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun pelayanan umum. Penelitian Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap penurunan Kesenjagngan Daerah melalui Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian lainnya Setyowati, Lilis dan Suparwati (2012) juga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan agar Dana Alokasi Khusus ini diatur lebih lanjut dalam bentuk PP, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal, yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah tertentu dan sesuai dengan Prioritas Nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus.

Tidak signfikannya dampak Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah, bisa disebabkan program dari Dana Alokasi Khusus yang diusulakan tidak memiliki program khusus untuk Sektor Ekonomi yang harapannya dapat menurunkan Kesenjangan. Program Dana Alokasi Khusus lebih diarahkan pada sector lain non produktif. Sebagai contoh Dana Alokasi Khusus diarahkan untuk sektor pembangunan gedung sekolah. Terdapat Sembilan Sekolah Tingkat SMP di Kukar saat ini menunggu pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat yang tersisa 20 persen. Pasalnya, progres Pembangunan Gedung baru dan Rehabilitasi 9 Sekolah hampir rampung. Terkait pencairan Dana Alokasi Khusus yang tersisa 20 persen, Pemerintah menunggu dari Pemerintah Pusat.

Pengaruh langsung Belanja Pembangunan terhadap tingkat kesenjangan daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Belanja Pembangunan (Y_1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2), sehingga hipotesis ditolak. Artinya upaya

menstimulus ekonomi masyarakat melalui Belanja Pembangunan dapat mempersempit jurang Kesenjangan Daerah di Kalimantan Timur. Upaya peningkatan Belanja Pembangunan tentu sangat tergantung dengan desentralisasi fiskal melalui Dana Perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat.

Desentralisasi fiskal yang merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai dengan banyaknya kewenangan Bidang Pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut Kusaini (2006: 29) Desentralisasi Fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Upaya ini dalam upaya pemerataan hasil-hasil Pembangunan menunjukkan bahwa Kesenjangan Ekonomi antar daerah masih terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Kesenjangan Ekonomi antar daerah yang diproksi dengan nilai Indeks Williamson menunjukkan bahwa, mulai pada tahun 2003 nilai Indeks Williamson berkisar antara nilai 0,02 dan 0,42. Pada tahun 2005 nilai Indeks Williamson mengalami perubahan menjadi berkisar antara 0,02 dan 0,45. Hal ini mengindikasikan masih terjadinya Kesenjangan Ekonomi antar daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil tidak signifikan juga terdapat pada dampak Belanja Pembangunan terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah, hal ini disebabkan memang postur APBD untuk Belanja Pembangunan mengalami penurunan drastis. Tekanan Ekonomi akibat melemahnya harga komoditas, menggerus belanja infrastruktur Kalimantan Timur. Tahun 2015, Kalimatan Timur hanya membelanjakan 13,21 persen dari total Belanja Daerah, atau hanya sekitar Rp1,1 triliun. Angka ini mencetak rekor sebagai Belanja Daerah paling rendah di banding tahun-tahun sebelumnya. Jumlah ini menurun 100% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,2 triliun. Sebagai gambaran, tahun 2013 Belanja Infrastruktur sebesar Rp 3,3 triliun atau sebesar 22,06 % dari APBD. Tahun 2014 tergerus hingga tinggal Rp 2,8 triliun dan terus menurun sampai Rp 1,7 triliun pada 2015. Ketika Pemerintah Pusat ramai-ramai menggelontorkan isu infrastruktur, Anggaran Tahun 2016 naik sedikit menjadi Rp 2,2 triliun. Dengan lemahnya sector belanja ini, berdampak terhadap upaya mempersempit jurang Kesenjangan Daerah di Kalimatan Timur.

Pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat kesenjangan daerah melalui belanja pembangunan provinsi Kalimantan Timur.

Hasil perhitungan pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) melalui belanja pembangunan (Y_1), diperoleh koefisien secara positif, sehingga hipotesis dapat dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) tidak secara langsung memiliki pengaruh secara negatif terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) melalui Belanja Pembangunan (Y_1) dapat diterima.

Upaya penurunan Ketimpangan atau Kesenjangan di daerah akan semakin dapat terealisasi jika Pendapatan Asli Daerah semkin tinggi, yang dapat mendukung program Pembangunan melalui peningkatan Belanja Pembangunan. Sejauh mana berbagai program yang dikembangkan pemerintah ke depan bakal efektif mempercepat upaya pemberantasan kemiskinan dan mengurangi polarisasi social masyarakat, tentu masih akan diuji oleh waktu, karena upaya pemerintah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga semakin mulai dirasakan di setiap Dearah (Setyowati dkk., 2012).

Belajar dari pengalaman, sepanjang program yang dikembangkan hanya berorientasi pada peningkatan produksi komoditas yang dihasilkan masyarakat miskin dan tidak menyentuh kebutuhan paling substansial, peluang untuk memberdayakan potensi dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akan terbuang sia-sia, namun jika didorong dengan peningkatan sektor rill maka juga akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Program pemberdayaan masyarakat miskin yang hanya memfokuskan pada upaya mendongkrak jumlah produksi, tetapi menafsikran arti penting pembagian margin keuntungan yang proporsional bagi si miskin, niscaya hasilnya tidak akan bias.

Pengaruh tidak langsung Dana Bagi Hasil terhadap tingkat kesenjangan melalui belanja pembangunan provinsi Kalimantan Timur.

Hasil perhitungan Pengaruh tidak langsung Dana Bagi Hasil (X_2) terhadap tingkat kesenjangan (Y_2) daerah melalui belanja pembangunan (Y_1), diperoleh koefisien positif, sehingga hipotesis ini menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (X_2) berpengaruh langsung secara positif terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) melalui Belanja Pembangunan (Y_1) dapat ditolak.

Hasil penelitian ini memiliki makna bahwa upaya tranfer Pemerintah Pusat dalam rangka menurunkan Kesenjangan di Daerah melalui berbagai program Pembangunan di Daerah. Kesenjangan antar daerah atau juga bisa dikatakan Kesenjangan antara Pusat dan Daerah berlanjut dengan ketidakadilan dalam pembagian hasil alam (Sasana, 2009). Daerah yang Sumber Daya Alamnya kaya, khususnya kaya akan tambang seperti minyak bumi, gas, batu bara dan emas seperti Riau, Kalimantan Timur, Papua dan beberapa daerah lainnya tidak dapat menikmati hasil alamnya yang kaya itu karena regulasi atau peraturan perundang-undangan tidak memihak kepada daerah tersebut. Padahal apa yang ada di daerah semestinya menjadi milik daerah dan dapat dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat daerah tersebut, maka dari itu pemerintah mendorong pemanfaatan Dana Bagi Hasil yang terus ditingkatkan (Sasana, 2009).

Ketika pemerintah harus memilih mengembangkan pendekatan *power to powerless* atau *power to everyone*, mau tidak mau pada tahap awal yang dibutuhkan adalah keberpihakan yang jelas hingga pada satu titik masyarakat miskin benar-benar siap untuk berkompetisi dalam struktur sosial-ekonomi secara adil. Wacana untuk mengembangkan kebijakan redistribusi aset adalah ide strategis yang perlu dikembangkan untuk membangun fondasi sosial bagi masyarakat miskin adalah memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk kemakmuran.

Pengaruh tidak langsung Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kesenjangan melalui belanja pembangunan provinsi Kalimantan Timur.

Hasil perhitungan pengaruh tidak langsung Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah (Y_2) melalui Belanja Pembangunan (Y_1), diperoleh koefisien negatif, sehingga hipotesis ini menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh langsung secara positif terhadap kesenjangan daerah (Y_2) melalui belanja pembangunan (Y_1) dapat diterima.

Tidak berdampaknya Dana Alokasi Khusus terhadap penurunan Kesenjangan melalui Belanja Pembangunan bisa disebabkan oleh rendahnya upaya Dana Alokasi Khusus mengontrol Belanja Pembangunan untuk sektor-sektor produktif, kabarnya Dana Alokasi Khusus hanya yang bersifar preventif, sehingga ada keterbatasan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah (Setyowati dan Suparwati, 2012).

Pemerintah Daerah memiliki wewenang yang "hampir" penuh atas penggunaan sumber-sumber fiskal mereka. Pemerintah daerah dan DPRD melakukan kontrol terhadap pengeluaran dari seluruh sumber penerimaan. Hal ini meliputi penerimaan daerah dari pajak dan retribusi, pendapatan dari sumber-sumber daya alam, dan dana hibah (kecuali Dana Alokasi Khusus), maka dari itu peran Dana Alokasi Khusus semakin menurun. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota saat ini mengelola sekitar 36 persen dari total pengeluaran publik, dibandingkan dengan kondisi pada pertengahan 1990-an yang hanya berjumlah sekitar 24 persen (Sasana, 2009).

Walaupun Pengeluaran Pemerintah Pusat di daerah (dekonsentrasi) terus mengalami peningkatan. Pada 2014, jajaran kementerian pusat menggunakan 50 persen lebih dari anggaran pembangunan mereka di daerah, terutama dalam sektor sosial melalui sebagian Dana Alokasi Khusus. Pengeluaran ini telah mengalami peningkatan sejak lama yaitu tahun 2003. Pengeluaran pemerintah pusat untuk bidang ini menambah total pengeluaran daerah menjadi sekitar 21 persen (Lewis dan Chakeri, 2004).

Pengeluaran dekonsentrasi untuk pembangunan sektor pendidikan dan sosial merupakan yang tertinggi. Pada 2015, kedua sektor ini masing-masing mencapai 17 persen dan 63 persen dari pengeluaran daerah. Pengeluaran dekonsentrasi untuk pembangunan sektor transportasi dan industri menunjukkan angka yang signifikan sebab pengeluaran daerah tahun 2014 untuk kedua

sektor ini hampir mencapai kenaikan dua kali lipat. Kecuali untuk Administrasi Kepemerintahan, lebih dari setengah pengeluaran pemerintah pusat digunakan untuk bidang ini. Pengeluaran Pemerintah pusat untuk aparatur Negara dapat dipastikan akan terkonsentrasi di Jakarta, inilah yang menyebabkan rendahnya peran Dana Alokasi Khusus dalam menurunkan Kesenjangan di Daerah.

V. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menguji beberapa hipotesis, terkait dengan Belanja Pembangunan dan Tingkat Kesenjangan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pengujian ini memberikan hasil bahwa Hasil penelitian menunjukkan pada model pertama, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus secara langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Model kedua Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus secara langsung berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah di provinsi Kalimantan Timur. Belanja Pembangunan secara langsung berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah melalui Belanja Pembangunan, diperoleh koefisien positif sebesar 0,042354, kemudian Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh langsung secara positif sebesar 0,005694 terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah, namun Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh tidak langsung secara negative sebesar - 0,002925 terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah, sehingga tidak dapat didukung hipotesisnya.

Beberapa saran diberikan antara lain Ketiga Variabel PAD, Dana Bagi Hasil maupun DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pembangunan, untuk itu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih mendorong penerimaan dari sektor Dana Perimbangan lain, misalnya DAU maupun sumber pembiayaan, hal ini disebabkan tiga komponen PAD, Dana Bagi Hasil maupun DAK tidak mampu membiayai besarnya dana pembanguan Kaltim yang luar biasa besar yang hingga tahun 2017 masih defisit. Namun demikian PAD, Dana Bagi Hasil maupun DAK semua berpengaruh signifikan dalam menurunkan ketimpangan atau ketidakseimbangan pendapatan di daerah, hingga ke depan pemerintah diharapkan lebih mengarahkan penerimaan ini untuk keperluan pembangunan sektor rill dalam rangka menurunkan kesenjangan di daerah. Pengaruh secara tidak langsung PAD dan DBH dapat menurunkan kesenjangan, berbeda dengan DAK yang tidak mampu menurunkan kesenjangan, diharapkan pemerintah untuk membuat skala prioritas pembangunan dan menggali kebutuhan pembangunan yang bisa dibiayai dari DAK dalam rangka meningkatkan kesejehteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Syukriy, Halim Abdul. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah." Dalam *Simposium Nasional Akuntansi VI,* 1140-1159. 2006.

Adiputra, I. M. P., Yantari, N. K. D. D., Darmada, D. K. D. 2015. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPa terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Akuntansi 18*. Medan 16-19 September 2015.

Ardiansyah dan Widiyaningsih, V. A. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Simposium Nasional Akuntansi 17 Lombok 24-27 September 2014.*

Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, Yogyakarta.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS). 2012. *Analisis Kesenjangan Antar Wilayah 2012*. Jakarta.

Budi, S. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Propinsi di Indonesia. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Darmayasa, I Nyoman dan Suandi. 2014. Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal APBD. Pemerintah Provinsi. SNA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram, Lombok.

Fitriyanti, I. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kota, Kabupaten dan Provinsi di DIY). UNY: Yogyakarta.

Gavin, M. and Hausmann, R., 1996. The roots of banking crises: the macroeconomic context.

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Badan Penerbit UNDIP : Semarang.

Grubel, H. 1998. Economic Freedom and Human Welfare: Some Empirical Findings. *Journal of Simon Fraser University. Vol 2: hal, 287-304.*

Hadi, S. 2009. Analisis dampak pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah, dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan di kab/kota provinsi Jawa Tengah dalam era desenralisasi fiskal. Universitas Brawijaya, Malang.

Hartono, B. 2008. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Ilzetzki, E. and Végh, C.A., 2008. *Procyclical fiscal policy in developing countries: Truth or fiction?* (No. w14191). National Bureau of Economic Research.

Jiwatami, S. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). Makalah pada Simposium Nasional Akuntansi XVI Mataram.(Artikel ke-146).

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29/2002 *tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD*.

Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah,* Erlangga. Jakarta.

Kuncoro. 2003. *Ekonomi Pembangunan,* edisi ketiga. Penerbit UPP AMPY KPN: Yogyakarta.

Kusuma Dewi dan Rahman. 2007. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Universitas Islam Indonesia.

Mardiasmo. 2009. Kebijakan Keuangan Daerah Pada Daerah Otonomi Khusus di Indonesia. Universitas Indonesia: Jakarta.

Marizka, R. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umumdan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian KeuanganDaerah pada Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat. *Artikel Ilmiah*. Fakultas Ekonomi Universitas Padang.

Masdjojo, G.N. dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tenggah Tahun 2006-2008. TEMA 6(1): 32-50.

Meilen G.P, Amran, Patrick W. Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2012. Universitas Samratulangi.

Mirza, D. S. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2006-2009. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, EDAJ. Vol 1: hal, 1-15.*

Mujib, Ibnu dan Abdullah Halim. 2009. Problem Desentralisaasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah. Sekolah Pascasarjana UGM: Yogyakarta.

Nugraeni. 2011. Analisis Pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi Pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Akmenika UPY, Yogyakarta. Vol 8

Patta. 2012. Analisis Pengaruh distribusi pendapatan dengan indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 tentang *Pajak Daerah*.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 tentang *Retribusi Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Pose, R. 2007. Fiscal Decentralization. Efficiency and Growth. *Journal of Department Of Geography and Environmental*, London School of Economics. London.

Prapti, L. 2006. Keterkaitan Antar Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan. *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro. Semarang.

Sarkoro, H. 2016. Pengruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Danan Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2012-2014). *Naskah Publikasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sarwono, Jonathan. 2007 Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS,. Yogyakarta : Andi Offset

Sasana, H. 2009. Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol 1: hal, 50-69.*

Sasana, Hadi. 2009. Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2009, Hal. 50 - 69 Vol. 16.

Setiyawati, A. dan Hamzah, A. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Universitas Trunojoyo. Vol.4, No. 2, hal. 211-228.*

Setyowati, L. dan Suparwati, Y. K. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jawa Tengah. 9(1), h: 113-133.*

Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. Prestasi Vol. 9 No. 1 – Juni 2012.

Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Baduose Media: Padang.

Sukirno, S. 2006. *Makroekonomi. Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Susanti, S. dan Fahlevi, H. 2007. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1, Halaman 183-191.*

Todaro, M. P. 2009. *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga: Jakarta.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Von Furstenberg, G.M., Green, R.J. and Jeong, J.H., 1986. Tax and spend, or spend and tax?. *The Review of Economics and Statistics*, pp.179-188.

Waluyo, J. 2007. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah Di Indonesia*. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Woo, W.T., 2009. Getting Malaysia out of the middle-income trap.